

# KAJIAN DINAMIKA PERUBAHAN DI DALAM RUMAH TANGGA SELAMA COVID 19 DI 34 PROVINSI DI INDONESIA

Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan)  
April – Mei 2020

## Executive Summary

Pemerintah Indonesia telah mengeluarkan sejumlah kebijakan dalam menyikapi situasi darurat terkait Pandemi COVID-19, diantaranya kebijakan pembatasan sosial dan jaga jarak diri (*social and physical distancing*), Kerja dari Rumah (KdR) dan Belajar dari Rumah (BdR). Kebijakan ini menimbulkan berbagai dampak yang khas bagi perempuan dalam konteks posisi perempuan dalam keluarga dan sebagai perempuan pekerja.<sup>1</sup>World Economic Forum (2020) menyatakan bahwa meskipun jumlah kematian laki-laki lebih tinggi dibanding perempuan dalam kasus COVID-19, namun kerentanan sosial dan ekonomi perempuan lebih tinggi. Hal ini karena jumlah perempuan sebagai pekerja kesehatan lebih banyak, bertanggung jawab sebagai perawat anak, dan mengalami beban ganda di kerja domestik saat pandemi. Sementara itu, secara konstruksi sosial budaya di Indonesia, posisi pengambilan keputusan dalam keluarga dan komunitas kebanyakan masih berada pada laki-laki dalam beragam hal, termasuk keputusan di Rumah Tangga. Pemahaman agama konservatif yang masih meyakini pekerjaan rumah tangga dan pengasuhan sebagai pekerjaan perempuan memperburuk perempuan di situasi pandemi ini.

Kebijakan KdR dikuatirkan akan berakibat pada hilangnya penghasilan keluarga atau semakin berkurangnya penghasilan sehingga dapat berdampak pada kecemasan dan juga pemicu terjadinya KDRT. Hal ini diperparah dengan banyaknya layanan penanganan korban yang mengurangi jenis layanan, mengubah cara mengakses layanan dan menghilangkan/memperpendek masa operasionalnya. Kebijakan BdR (belajar dari rumah) dapat berarti pelimpahan tugas-tugas guru kepada orang tua terutama ibu. Ini menjadi beban tersendiri terutama ketika sekolah tidak menyediakan panduan yang cukup bagi orang tua untuk mendampingi anak dalam belajar. Hal ini menambah persoalan di saat penggunaan teknologi informasi dan komunikasi di tengah kondisi keuangan keluarga yang terbatas. Ketika kerja domestik tertumpuk pada perempuan dan asupan gizi terbatas, kondisi ini dapat menyebabkan kelelahan fisik dan psikis perempuan sehingga mereka semakin rentan terinfeksi COVID-19. Kebijakan KdR dan BdR juga dapat meningkatkan kerentanan perempuan pekerja rumah tangga (PRT). Pembatasan sosial tidak berlaku bagi PRT, mereka tetap bekerja tanpa perlindungan dari penularan COVID-19.

Berdasarkan potensi kerentanan-kerentanan yang disebutkan di atas, maka Komnas Perempuan mengadakan Kajian Singkat terkait dengan Dinamika Perubahan Rumah Tangga Selama Masa COVID-19. Kajian ini membahas beberapa hal terkait 1) Perubahan Beban Kerja di Rumah Tangga dan pengasuhan yang terjadi selama

---

<sup>1</sup>Siaran Pers Komnas Perempuan: "Urgensi Perspektif HAM dengan Perhatian Khusus Pada Kerentanan Perempuan dalam Penanganan COVID" diunduh dari website [www.komnasperempuan.go.id](http://www.komnasperempuan.go.id)

Masa Pandemi COVID-19; 2) kekerasan yang dialami perempuan dalam ranah personal/KDRT selama masa Pandemi COVID-19; dan 3) pemenuhan akses layanan yang tersedia; dan 4) Dampak Kebijakan Bekerja dan Belajar dari Rumah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Teknis pengumpulan data menggunakan survei *online* (daring) secara terbuka, yang juga memiliki kelemahan, yakni tidak dapat menentukan target tertentu dan jumlah tertentu. Sebagai hasilnya, misalnya data yang diperoleh jika dilihat dari jenis kelamin dan asal domisili menjadi tidak seimbang. Selain itu, penelitian ini terbatas pada mereka yang dapat mengisi data secara online dan memiliki jaringan internet yang memadai. Jumlah responden survei ini adalah 2285, yang didominasi oleh perempuan, yang berasal dari pulau Jawa berusia 31-50 tahun, lulusan S1/ sederajat, dengan penghasilan 2-5 juta rupiah, menikah, punya anak, dan pekerja penuh waktu di sektor formal serta tidak mempunyai anggota keluarga rentan. Tabel 1 memperlihatkan profil responden dalam penelitian ini secara detail:

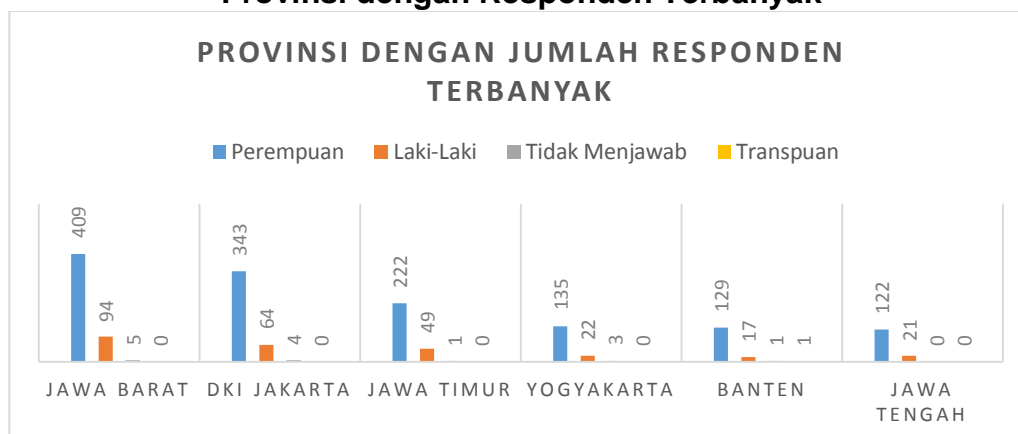
**Tabel 1:**  
**Profile Responden (N=2285)**

N O	Aspek	Sub Aspek	Prm (N=1885)	Laki (N=379)	Tdk Jawa b (N=19)	Transpu an (N=2)	Tota l
1	Usia	Di bawah 18 Tahun	0	0	1	0	1
		18-30 Tahun	384	60	7	1	452
		31-40 Tahun	638	113	2	1	754
		41-50 Tahun	568	129	5	0	702
		51-60 tahun	247	59	4	0	310
		Di atas 60 tahun	48	18	0	0	66
2	Pendidikan	Tidaksekolah	1	0	0	0	1
		SD/MI/Sederajat	9	2	0	0	11
		SMP/MTs/Sederajat	30	1	1	0	32
		SMA/SMK/MA/Sederajat	273	34	2	0	309
		D3/Sederajat	133	20	3	0	156
		D4/S1/Sederajat	874	177	6	2	1059
		Pascasarjana	565	145	7	0	717
3	Penghasilan	TidakMenjawab	343	19	1	0	363
		Kurang dari 2 Juta Rupiah	347	41	4	0	392
		2 – 5 Juta Rupiah	519	122	4	1	646
		5 – 10 Juta Rupiah	384	99	3	1	487
		Lebihdari 10 Juta Rupiah	292	98	7	0	397
4	Status Perkawinan	Menikah	1546	331	12	1	1890

		TidakMenikah	339	48	7	1	395
5	Status Pekerjaan	Paruh Waktu	534	94	7	1	636
		Penuh Waktu	1009	259	11	1	1280
		TidakMenjawab	342	26	1	0	369
6	SektorPekerjaan	Formal	1098	274	11	1	1384
		Informal	450	84	7	1	542
		TidakMenjawab	337	21	1	0	359
7	Urus RT	Tidak	204	62	3	0	269
		Ya	1656	313	15	2	1986
		TidakMenjawab	25	4	1	0	30
8	Memiliki Anak	Tidak	70	6	1	450	373
		Ya	309	13	1	1835	1512
9	Jumlah Anak	1 - 2 orang	981	183	8	1	1173
		3 - 5 orang	656	161	6	1	824
		Lebihdari 5 orang	116	14	2	0	132
		TidakRelevan	132	21	3	0	156
10	KeluargaRentan	Tidak	1278	282	12	2	1574
		Ya	607	97	7	0	711

Survei daring ini berhasil mengumpulkan responden yang tersebar di 34 Provinsi di Indonesia. Walaupun semua Provinsi terwakili, sebagian besar responden masih berasal dari Pulau Jawa, yaitu Jawa Barat, DKI Jakarta, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten dan Jawa Tengah, dengan peringkat tertinggi berasal dari Jawa Barat. Tabel 2 menginformasikan enam provinsi dengan jumlah responden ini merupakan wilayah-wilayah dengan persebaran kasus COVID19 tertinggi di Indonesia. Oleh karena itu, hasil Analisa survei kemungkinan tidak mewakili keadaan di luar Jawa, terutama di daerah timur Indonesia.

**Tabel 2**  
**Provinsi dengan Responden Terbanyak**



Berdasarkan hasil survei, *Dinamika Perubahan Rumah Tangga di Indonesia* secara signifikan memperlihatkan adanya beberapa hal, sebagai berikut:

### **1. Perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan yang terjadi selama Masa Pandemi COVID-19**

- Mayoritas responden mengaku mengurus rumah tangga (Perempuan 89%; Laki-Laki 83,4%), dimana 96% melaporkan bahwa beban pekerjaan rumah tangga semakin banyak. Perempuan bekerja dua kali lipat dari pada laki-laki dalam hal mengerjakan pekerjaan rumah tangga dengan durasi lebih dari 3 jam. Terdapat 1 dari 3 responden yang melaporkan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga membuat dirinya mengalami stress.
- 70% responden perempuan menjawab bahwa pekerjaan rumah tangga, terutama memasak dan mencuci pakaian, bertambah secara signifikan sejak COVID-19. Sementara hanya sekitar 49% responden laki-laki menjawab pekerjaan rumah tangga mereka bertambah. Hasil ini menyiratkan bahwa beban pekerjaan rumah tangga selama COVID19 secara umum masih ditanggung oleh perempuan, dibandingkan laki-laki.
- Kebanyakan responden (58%) melaporkan bahwa anaknya membantu pekerjaan rumah tangga. Ada sekitar 70% responden menyatakan bahwa anak laki-laki maupun perempuan membantu pekerjaan rumah tangga. Walaupun kebanyakan responden yang punya anak lebih dari 5 melaporkan tidak bertambah pekerjaannya, namun jumlah anak banyak tersebut tetap mempengaruhi tingkat stress selama COVID-19. Semakin banyak anak maka pengeluaran semakin bertambah. 70% responden yang memiliki anak lebih dari 3 orang menyatakan pengeluaran rumah tangga semakin bertambah.
- Mayoritas (72%) responden melaporkan bahwa pengeluaran semakin bertambah di masa pandemi COVID-19, dan hanya 1% yang melaporkan penghasilan bertambah. Beban pengeluaran ini juga bertambah dengan adanya biaya tambahan untuk kuota internet selama belajar dan kerja dari rumah, juga sarana teknologi lainnya seperti laptop atau *mobile phone* yang memadai untuk kebutuhan kerja dan belajar online. Masalah lainnya adalah harga kebutuhan pangan juga mengalami kenaikan di pasaran, yang mendorong pengeluaran menjadi meningkat dari biasanya.
- Ada sekitar 40% responden menyatakan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaannya. Hal serupa juga dialami para siswa yang sedang belajar dan kuliah, lebih kurang 30% mereka juga menyatakan khawatir hingga sangat khawatir dalam mendapatkan akses belajar yang optimal.

### **2. Kekerasan yang dialami perempuan dalam ranah personal/KDRT selama masa Pandemi COVID-19**

- Sejak Pandemi COVID-19, 1 dari 3 responden melaporkan bahwa hubungan dengan pasangan semakin harmonis dan hampir 40% responden melaporkan bahwa mereka tidak mengalami perubahan apapun. Ada sekitar 10.3% (235) responden melaporkan bahwa hubungan mereka dengan pasangannya semakin tegang, dimana mereka yang mempunyai status menikah lebih rentan (12%) daripada yang tidak menikah (2.5%).
- Jika dilihat berdasarkan usia responden, usia 31-40 tahun adalah kelompok yang paling banyak menjawab bahwa hubungan dengan pasangan menjadi lebih tegang sejak pandemi COVID-19. Lebih jauh lagi, jika dicermati berdasarkan penghasilan responden, terdapat 2 kali lebih banyak jumlah

responden dengan penghasilan di bawah 5 Juta Rupiah yang menyatakan bahwa hubungan dengan pasangan semakin tegang sejak pandemi COVID-19, dibandingkan kelompok responden yang memiliki penghasilan di atas 5 Juta Rupiah, yaitu sebanyak 122 orang. Hal ini bisa jadi mengindikasikan asosiasi antara kelas sosial ekonomi tertentu dengan tingkat keharmonisan rumah tangga selama COVID 19.

- Berdasarkan jenisnya, pada perempuan lebih banyak mengalami semua jenis kekerasan dibandingkan laki-laki. Selama Pandemi COVID-19 secara umum kekerasan psikologis dan ekonomi lebih umum dialami oleh responden daripada jenis kekerasan lainnya. Untuk kekerasan psikologis, 15,3%, atau 289 perempuan, menjawab kadang-kadang mengalami, dan 3,5%, atau 66 perempuan, menjawab sering mengalami. Sementara, untuk kekerasan yang sama hanya 10,81%, atau 41 laki-laki, yang menjawab kadang-kadang dan 0,54% atau 2 orang yang menjawab sering. Untuk kekerasan ekonomi, hampir 10 persen dari responden perempuan mengalami (kadang-kadang atau sering), atau setara dengan 135 orang. Sedangkan laki-laki yang mengalami hanya kurang dari 4%, atau setara dengan 18 orang, dari total 379 responden laki-laki.
- Prevalensi kekerasan terhadap anggota keluarga lain mengikuti pola prevalensi kekerasan terhadap diri sendiri di mana kekerasan psikologis dan ekonomi terlihat lebih sering terjadi dibandingkan kekerasan fisik dan seksual. Sebanyak 15,5% atau 292 responden perempuan dan 12,15%, atau 46 responden laki-laki menyebutkan bahwa terjadi kekerasan psikologis terhadap anggota keluarga lain di rumah. Sementara 5,42%, atau 102 responden perempuan, dan 4% atau 19 responden laki-laki, menjawab bahwa terjadi kekerasan ekonomi terhadap anggota keluarga lain di rumah.
- Anak teridentifikasi sebagai anggota keluarga di rumah yang paling banyak mengalami kekerasan, diikuti oleh pasangan dan ibu/mertua perempuan. Pasangan teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan baik terhadap diri sendiri, maupun terhadap anggota keluarga lain. Menariknya, selain sebagai korban kekerasan, anak juga disebutkan sebagai pelaku kekerasan kedua setelah pasangan, diikuti ibu/mertua perempuan untuk kekerasan terhadap diri sendiri dan ayah/mertua laki-laki untuk kekerasan terhadap anggota keluarga lain.
- Secara frekuensi, kekerasan semakin sering terjadi pada perempuan (8%), dari pada laki-laki (4%) dengan status perkawinan menikah, dan berada di rentang usia 31- 40 tahun serta penghasilan di bawah 5 juta rupiah. Perempuan juga mengalami frekuensi kekerasan yang semakin sering dari anggota keluarga lain serumah.
- Banyak anak yang dimiliki mempengaruhi frekuensi kekerasan, dimana Jumlah anak 3 hingga lebih dari 5 anak menyumbang 8% hingga 9% sering terjadinya kekerasan.
- Pekerja di sektor informal lebih rentan mengalami kekerasan dari pada pekerja di sektor formal selama Pandemi COVID-19. Hal ini karena kerja informal lebih memiliki ketidakjelasan secara penghasilan di masa pandemi COVID-19. Situasi tersebut diduga mendorong terjadinya kekerasan ekonomi, yang berdampak secara paralel terhadap terjadinya kekerasan fisik, psikologis dan seksual.
- Kekerasan semakin sering terjadi pada kelompok yang memiliki pengeluaran bertambah pada keluarga yang punya penghasilan kurang dari 5 juta rupiah sejak masa pandemi COVID-19. Kekerasan yang sering terjadi ini dinyatakan

oleh hampir 80% lebih responden. Artinya kekerasan ekonomi menjadi salah satu factor pendorong terhadap terjadinya kekerasan.

- Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah terjadi prosentase kekerasan fisik dan seksual sebesar 100 %, dibandingkan kekerasan psikologis dan ekonomi, yang mencapai 50% atau lebih.

### 3. Pemenuhan akses layanan

- Secara keseluruhan baik yang mengalami kekerasan atau tidak, Upaya melapor jika mengalami kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi sekitar 14% responden atau 316 orang menjawab diam saja atau tidak melakukan apa-apa, 13% atau 296 responden memberitahukan kepada saudara, teman atau tetangga terdekat, 9,8% atau 223 responden melapor ke Lembaga yang menyediakan layanan pengaduan kekerasan terhadap perempuan. Namun Jika dilihat dari korban yang melaporkan semakin sering mengalami kekerasan saat COVID-19, ada sekitar 88% perempuan, 10% laki-laki, Jenis Kelamin lain/Tidak menjawab 2% dan dari mereka ada sekitar 80.3% yang tidak melapor ke lembaga layanan.
- Sikap diam saja atau memberitahukan kepada saudara, teman dan/atau tetangga juga ternyata merupakan pilihan perempuan yang berstatus menikah dan tidak menikah, dengan status menikah lebih tinggi persentasenya, sebesar kurang lebih hampir 15%. Hal yang menarik adalah sikap tersebut didominasi oleh responden dengan latar belakang Pendidikan minimal S1 hingga pascasarjana, dan jika dijumlah keseluruhan mencapai 79% untuk diam saja, dan 77% hanya memberitahu kerabat terdekat.
- Hal ini menguatkan asumsi bahwa angka kekerasan terhadap perempuan adalah fenomena gunung es, di mana data dan angka yang ada yang tersedia hanyalah data-data yang dilaporkan. Pilihan-pilihan jawaban responden ini bila dikaitkan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar diberlakukan, dikarenakan korban dan pelaku kekerasan berada di rumah bersama-sama selama masa PSBB, yang menyebabkan korban takut untuk melapor. Sementara, pilihan jawaban tidak relevan memiliki jumlah tinggi sekitar 35% atau 814 responden karena jumlah responden yang mengisi survei menyatakan tidak mengalami kekerasan selama Kebijakan KdR dan PSBB diberlakukan.
- Sebanyak 68,8% atau 1.573 responden tidak menyimpan kontak layanan pengaduan. Data ini menunjukkan bahwa baik pada laki-laki maupun perempuan mempunyai kesadaran yang rendah dalam hal manajemen resiko kekerasan.
- Secara keseluruhan ada 172 responden (136 orang diantaranya perempuan) yang menjawab mengalami kesulitan dalam mengakses layanan pengaduan. Dalam pertanyaan terbuka ditemukan bahwa kesulitan mengakses layanan ini karena masalah literasi teknologi. Sarana dan prasarana teknologi seperti *mobile phone* atau laptop/desktop serta kapasitas penguasaan teknologi yang ada dan tersedia, tidak memadai, termasuk pengadaan kuota dan jaringan internet yang stabil. Situasi ini perlu menjadi perhatian dalam situasi pandemi ini. Kesulitan mengakses layanan ini pun dialami oleh kelompok responden yang terdampak pengeluaran bertambah selama masa pandemi (mencapai 8% responden, 136 orang responden).

#### 4. Dampak Kebijakan Bekerja dan Belajar dari Rumah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

- Sekitar 89% responden memilih bahwa kebijakan Bekerja dan Belajar dari Rumah serta Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dapat menguntungkan dan merugikan. Mereka yang hanya menjawab menguntungkan sekitar 9% sedangkan yang merugikan sekitar 6%. Laki-laki lebih merasa dirugikan (8.4%) dari pada perempuan (5.7%).
- Rentang usia 18 – 30 tahun dan 31 – 40 tahun dengan penghasilan kurang dari 2 juta rupiah menyatakan hal yang sama bahwa kebijakan pembatasan sosial dan bekerja dari rumah cenderung merugikan mereka.
- Kelompok responden yang tidak menikah pun menyatakan bahwa kebijakan tinggal di rumah ini juga merugikan.
- Hal yang menarik lainnya adalah responden dengan penghasilan di atas 10 juta menyatakan bahwa kebijakan *stay at home* ini menguntungkan ketika terjadi di kelompok usia antara 41-50 tahun.
- Responden dalam pertanyaan terbuka menyatakan bahwa kebijakan PSBB belum optimal dan pemerintah masih belum tegas dalam menerapkan kebijakan tersebut. Kebijakan ini pun tidak hanya terfokus kerja dan belajar dari rumah, tetapi juga meliputi anggaran bantuan ekonomi kelompok yang tidak mampu secara merata, teridentifikasi dengan jelas, anggaran yang transparan, dan sanksi bagi yang melanggar kebijakan PSBB. Kebijakan lainnya yang menjadi perhatian pemerintah adalah kebijakan terkait teknologi dan informasi serta Pendidikan yang ramah terhadap anak selama masa pandemi COVID-19. Misalnya, waktu belajar dengan PR yang tidak terlalu banyak tapi efektif dan efisien; akses belajar yang optimal berupa panduan teknologi, subsidi kuota dan jaringan internet yang memadai, juga faktor Kesehatan mata karena anak seringkali berkutat di depan monitor laptop atau desktop. Kebijakan lainnya yang menjadi perhatian adalah kebijakan Kesehatan mental baik yang belajar dan bekerja di Rumah.

#### Kesimpulan

1. Masa Pandemi COVID-19 mendorong adanya perubahan beban kerja rumah tangga dan pengasuhan, pengeluaran cenderung bertambah dan kekhawatiran akan kehilangan pekerjaan dan mengakses belajar yang optimal.
2. Perempuan menghadapi dampak yang sangat khas karena peran gender yang disematkan padanya, terutama karena masih adanya keyakinan bahwa Kerja Domestik menjadi tanggungjawab terbesar dan utama yang dibebankan pada perempuan. Perempuan mengalami penambahan waktu kerja di domestik dua kali lipat, karena adanya tugas tambahan untuk mendampingi anak belajar di rumah, yang biasanya dilakukan di sekolah. Kebijakan *stay at home* memaksa perempuan untuk mempelajari teknologi belajar secara online untuk anaknya, kebutuhan hidup sehat dan bersih serta pelayanan kebutuhan pangan dengan asupan gizi cukup selama masa COVID-19 sehingga memaksa perempuan memberikan waktu berlebih untuk kerja domestik. Karenanya, 1 dari 3 responden perempuan menyatakan bahwa bertambahnya pekerjaan rumah tangga telah menyebabkan naiknya tingkat stress pada mereka.

3. Jumlah anak ternyata merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi stress dan bertambahnya beban kerja serta menyebabkan pengeluaran yang juga semakin bertambah.
4. Kekerasan dalam RumahTangga tetap terjadi di masa pandemi COVID-19 dan, didominasi oleh kekerasan psikologis dan ekonomi. Kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam Rumah Tangga adalah kelompok perempuan, kelompok usia rentang 31 - 40 tahun, kelompok dengan status perkawinan menikah, kelompok penghasilan kurang dari 5 juta rupiah, kelompok yang memiliki jumlah anak 3 – 5 orang dan lebih dari 5 orang, dan kelompok yang tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia.
5. Anak teridentifikasi sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga sekaligus juga teridentifikasi sebagai pelaku kekerasan dalam rumah
6. Rumah tangga dengan pengeluaran bertambah memiliki peluang terjadi kekerasan fisik dan seksual yang lebih tinggi. Persoalan ekonomi berpotensi dalam mendorong kekerasan fisik dan seksual dalam Rumah Tangga
7. Upaya melaporkan kekerasan di Lembaga layanan menurun angkanya di masa pandemi COVID-19 ini karena sikap diam saja atau memberitahukan kepada saudara, teman dan/atau tetangga menjadi pilihan perempuan yang berstatus menikah dan tidak menikah, dengan didominasi oleh responden, ataupun oleh responden dengan latarbelakang Pendidikan minimal S1 hingga pascasarjana. Hal lainnya adalah masih rendahnya kesadaran publik untuk menyimpan kontak layanan pengaduan.
8. Literasi teknologi dan masalah ekonomi di masa pandemik COVID-19 ini saling berkelindan menjadi faktor pendorong dalam mengakses layanan pengaduan, masalah kerja dari rumah dan belajar dari rumah. Jaringan internet yang tidak stabil, anggaran untuk kuota internet dan bagaimana menggunakan teknologi yang ada kerap menjadi permasalahan yang muncul selama masa pandemi COVID-19. Masyarakat Indonesia masih belum siap dengan teknologi daring dan infrastruktur teknologi belum tersedia secara merata, termasuk keamanan datanya, di 34 provinsi di Indonesia.

## **Rekomendasi**

Hasil dari survey daring pada perubahan dinamika rumah tangga di masa Covid-19 menunjukkan kecenderungan dampak secara sosial, budaya dan ekonomi yang dihadapi kelompok yang rentan mengalami kekerasan dalam Rumah Tangga yaitu perempuan, dengan latar belakang terutama kelompok usia rentang 31- 40 tahun, kelompok dengan status perkawinan menikah, kelompok penghasilan kurang dari 5 juta rupiah, kelompok yang memiliki jumlah anak 3 – 5 orang dan lebih dari 5 orang, dan kelompok yang tinggal di provinsi yang teridentifikasi jumlah kasus COVID-19 tertinggi di Indonesia. Berdasarkan hal tersebut maka disampaikan Rekomendasi sebagai berikut :

1. Pemerintah memastikan Kebijakan PSBB maupun kebijakan terkait penanganan COVID19 selanjutnya mencakup pertimbangan dan terobosan penyikapan yang lebih komprehensif. Selain aspek kesehatan, kebijakan-kebijakan tersebut perlu mempertimbangkan aspek sosial, budaya dan ekonomi, serta memperhatikan aspek teknologi dan informasi, kesehatan mental, dan mengintegrasikan pencegahan kekerasan dalam rumah tangga .
2. Dengan mempertimbangkan bahwa perempuan merupakan kelompok yang



paling terdampak, karena secara konstruksi budaya rumah tangga menjadi tugas domestik perempuan, maka perlu ada skema dukungan khusus bagi Perempuan. Bantuan ekonomi yang disediakan oleh pemerintah perlu mencakup bantuan kebutuhan pokok, Sekaligus memberikan peluang dan kesempatan kerja yang kreatif yang bisa dikerjakan di rumah tanpa harus kehilangan pekerjaan, terutama yang bekerja di sektor informal. Bantuan ekonomi inipun perlu teridentifikasi dan terdokumentasi dengan baik dan transparan, sehingga perempuan kepala keluarga, para pekerja di sektor informal, rumah tangga dengan jumlah anak yang lebih dari 3 hingga 5 orang anak, kelompok berpenghasilan kurang dari 5 juta, dapat menjadi bagian target langkah afirmasi dalam pemberian daftar penerima bantuan ekonomi.

3. Pemerintah perlu segera mempersiapkan teknologi dan informasi yang cukup kepada masyarakat serta memastikan masyarakat Indonesia memiliki akses dan literasi terhadap teknologi dengan infrastruktur yang memadai. Hal ini mencakup pada jaringan internet, keamanan data di sosial media, laptop/desktop/mobile phone yang memadai serta harga kuota internet yang bisa dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.
4. Pemerintah memastikan penyelenggaraan layanan tersedia dan gampang diakses bagi korban kekerasan yang akan mengadukan kasusnya. Perhatian juga harus diberikan pada ketersediaan teknologi dan informasi, dana dan akses pengaduan yang ramah dan aman selama masa pandemi COVID-19 ini.
5. Penyebarluasan informasi mengenai layanan yang tersedia dan hak-hak perempuan korban kekerasan, khususnya dalam konteks KDRT, perlu diperluas dan diperbanyak. Media massa pemerintah seperti RRI dan TVRI nasional maupun daerah dapat dimanfaatkan untuk sosialisasi layanan pengaduan terstruktur yang disediakan pemerintah di seluruh Tanah Air dengan memperhatikan kebutuhan kelompok rentan disabilitas

## **Penutup**

Komnas Perempuan berterima kasih kepada semua responden yang sudah meluangkan waktu dan pikiran untuk mengisi survei ini dan menjadi bagian penting untuk pemenuhan hak-hak perempuan. Terima kasih juga kami sampaikan kepada program MAMPU yang telah memberikan dukungan untuk penelitian ini.

Tim Peneliti, Analisa Data dan Diskusi: Alimatul Qibtiyah, Andy Yentriyani, Dwi Ayu Kartika, Mariana Amiruddin, Maria Ulfah Anshor, Marisna Yulianti, Rainy Maryke Hutabarat, Retty Ratnawati, Satyawanti Mashudi, Siti Nurwati Hodijah, Theresia Sri Endras Iswarini

Tim Penulis: Alimatul Qibtiyah, Retty Ratnawati, Siti Nurwati Hodijah, Dwi Ayu Kartika, Marisna Yulianti

@ Komnas Perempuan, Jakarta  
Juni 2020